

Dinamika Politik Lokal dan Sirkulasi Elite di Desa Sendayan Kampar Provinsi Riau

Efria Nadila¹, Nora Susilawati^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: norasusilawati@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa desa sebagai satuan pemerintahan terkecil umumnya dikenal menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, solidaritas, dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Realitasnya di Desa Sendayan muncul dinamika politik pasca Pilkades yang tidak hanya mencerminkan praktik demokrasi lokal, tetapi juga memunculkan persaingan antar elite yang berdampak pada perubahan struktur sosial dan pola interaksi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan teori Sirkulasi Elite oleh tokoh Vilfredo Pareto. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana dinamika politik yang terjadi di masyarakat Desa Sendayan. Fenomena politik desa ini menarik karena memperlihatkan perubahan struktur sosial, munculnya persaingan antar kelompok, serta pergeseran interaksi sosial pasca Pilkades. Pendekatan penelitian yakni kualitatif dengan tipe studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi non partisipasi dan wawancara mendalam terhadap 15 informan yang dipilih secara purposive, diantaranya kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM, ninik mamak, tokoh masyarakat dan masyarakat. Selanjutnya data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dinamika politik di Desa Sendayan berlangsung melalui enam tahapan, yaitu terpilihnya kepala desa pada Pilkades 2021, munculnya protes terhadap kinerja kepala desa, berkembangnya penghasutan, terjadinya konflik, upaya penyelesaian konflik, serta pergantian elite yang berkuasa pasca konflik. Rangkaian peristiwa ini mencerminkan proses sirkulasi elite sebagaimana dikemukakan Pareto, di mana kekuasaan bersifat dinamis dan bergeser melalui kompetisi dan konflik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa sirkulasi elite di tingkat desa tidak hanya bermakna pergantian kekuasaan, tetapi juga menjelaskan keberlanjutan konflik dan fragmentasi sosial akibat belum tuntasnya integrasi antara elite lama dan elite baru.

Kata Kunci: Dinamika Politik; Konflik; Masyarakat Pedesaan; Politik Desa.

Abstract

This research is motivated by the fact that villages, as the smallest government units, are generally known to uphold the values of family, solidarity, and deliberation in resolving collective problems. In reality, in Sendayan Village, political dynamics emerged after the Village Head Election (Pilkades), which not only reflected local democratic practices but also gave rise to competition between elites, impacting changes in social structures and community interaction patterns. This study uses the Elite Circulation theory by Vilfredo Pareto. The purpose of this study is to analyze the political dynamics occurring in the Sendayan Village community. This village political phenomenon is interesting because it shows changes in social structures, the emergence of competition between groups, and shifts in social interactions after the Village Head Election. The research approach is qualitative with a case study type. Data were collected through non-participant observation and in-depth interviews with 15 purposively selected informants, including the village head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), the Community Empowerment Institution (LPM), the Ninik Mamak (nun mamak), community leaders, and the community. Furthermore, the data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the political dynamics in Sendayan Village progressed through six stages: the election of the village head in the 2021 Village Head Election, the emergence of protests against the village head's performance, the development of incitement, the emergence of conflict, efforts to resolve the conflict, and the replacement of the ruling elite after the conflict. This series of events reflects the elite circulation process as proposed by Pareto, where power is dynamic and shifts through competition and conflict. The novelty of this research lies in the assertion that elite circulation at the

village level not only signifies a change in power but also explains the continuation of conflict and social fragmentation due to the incomplete integration between the old and new elites.

Keywords: Conflict; Political Dynamics; Rural Society; Village Politics.

How to Cite: Nadila, E. & Susilawati, N. (2026). Dinamika Politik Lokal dan Sirkulasi Elite di Desa Sendayan Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(3), 559-571.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

Pendahuluan

Masyarakat pedesaan merupakan salah satu entitas sosial yang memiliki karakteristik khas, yaitu kehidupan yang masih erat dengan nilai-nilai tradisional, ikatan kekerabatan yang kuat, serta ketergantungan pada sumber daya alam. Realitanya seiring dengan perkembangan zaman dan arus modernisasi, masyarakat desa juga mengalami berbagai perubahan yang memengaruhi tatanan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Salah satu aspek penting yang mengalami perkembangan signifikan adalah dinamika politik di tingkat pedesaan (Prastiwi & Ulfah, 2022). Dinamika politik masyarakat pedesaan bukan hanya berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa, tetapi juga mencakup pola hubungan kekuasaan, pembagian peran, partisipasi warga, serta interaksi antara berbagai lembaga lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh adat setempat (Bapa & Ola, 2020).

Desa juga memiliki kewenangan otonom melalui kebijakan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam konteks ini, kepala desa memiliki peran strategis sebagai penggerak pemerintahan desa sekaligus sebagai tokoh politik lokal. Namun demikian, kewenangan yang besar juga menimbulkan potensi munculnya konflik kepentingan, persaingan politik, bahkan konflik horizontal di antara warga desa. Fenomena semacam ini sering terjadi, terutama menjelang dan setelah pemilihan kepala desa, di mana kompetisi politik kerap memecah belah solidaritas sosial masyarakat (Kolang & Mesra, 2025). Dinamika politik masyarakat pedesaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya lokal yang masih mengakar kuat. Nilai-nilai adat, norma, dan struktur kepemimpinan tradisional seperti peran ninik mamak atau tokoh adat sering kali memengaruhi jalannya proses politik di desa (Taqwa & Usman, 2023). Di satu sisi, kondisi ini dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk menjaga stabilitas,

Di sisi lain juga dapat menjadi hambatan apabila kepentingan adat berbenturan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern (Rohmawati, 2020). Dinamika politik masyarakat pedesaan juga berhubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingginya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, perumusan program pembangunan, dan pengawasan jalannya pemerintahan desa menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi lokal. Namun pada praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat formalitas atau terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja. Faktor rendahnya pendidikan politik, dominasi elite lokal, serta rendahnya akses informasi sering menjadi kendala bagi masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam proses politik (Wahyudi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dinamika politik di pedesaan, baik dari segi struktural, kultural, maupun personal. salah satu daerah yang mengalami dinamika politik pada tatanan lokal yakni desa Sendayan.

Desa Sendayan terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi salah satu wilayah yang tidak luput dari potensi konflik politik, konflik ini bermula pada 24 November 2021 terjadi proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak se Kabupaten Kampar. Pada pemilihan itu terdapat 4 calon kepala desa yaitu (1) AG (48 tahun) latar belakang pekerjaannya sebagai wiraswasta, (2) AN (45 tahun) yang berlatar belakang pekerjaan pengusaha, (3) SD (45 Tahun) yang bekerja sebagai Wiraswasta (4) MR (41 tahun) yang pada saat itu bekerja sebagai karyawan kantor. Menurut Rakan & Suhartono (2025) proses pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis dimulai dari proses pencalonan, kampanye, masa tenang sampai kepada tahap pemilihan yang berlangsung pada tanggal 24 November 2021 (Hendrajad, 2021). Terdapat 3 tempat pemungutan suara (TPS) di desa Sendayan, TPS 1 bertempat di PDTA Kapur, TPS 2 bertempat di Wustho Dusun II Kapur dan TPS 3 bertempat di Surau Alhidayah Dusun Teratak Padang.

Setelah dilakukan proses pemilihan dan penghitungan suara kepala desa di 3 TPS yang ada dinyatakan suara terbanyak diraih oleh calon no 4 yakni MR. Tepatnya Rabu, 22 Desember 2021 pelantikan resmi oleh Bupati Kampar yakni bapak Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH di aula Kantor Bupati Kabupaten Kampar. Setelah kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati Kampar maka proses

pelaksanaan tugas desa sudah menjadi tanggung jawab kepala desa terpilih dan program kerja yang sudah dirancang sudah harus mulai dijalankan beberapa program kerja yang ada.

Data menunjukkan bahwa salah satu masyarakat di desa Sendayan menyebutkan bahwa adanya program kerja yang belum terselesaikan dibidang pembangunan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, oleh sebab itu masyarakat merasa kecewa dengan pemerintahan kepala desa saat itu karena adanya proses pembangunan desa yang tidak sesuai dengan harapan.



Gambar 1. Screenshot Group WhatsApp

Sumber: Group WhatsApp Pultra Club

Dari gambar *screenshot Group WhatsApp* diatas menunjukkan bahwa Berita konflik di Desa Sendayan ini diliput dimedia dan disebar melalui *WhatsApp Group PULTRA CLUB KAPUR*, keberadaan *Group WhatsApp PULTRA CLUB Kapur* ini pada mulanya ditujukan untuk info masyarakat dusun Kapur desa Sendayan, *Group WhatsApp PULTRA CLUB Kapur* ini dibuat pada 22 Oktober 2019 oleh inisial RM (26 tahun) selaku sekretaris pemuda dusun Kapur, grub ini tujuan awalnya dibuat untuk silaturahmi antar sesama warga dusun 2 Kapur dan saling berbagi informasi terkait dengan seluruh kegiatan desa. Untuk anggota grub adalah masyarakat dusun 2 kapur. Seiring dengan adanya konflik yang terjadi di Desa Sendayan ini maka permasalahan ini muncul atau mencuat dalam *Group WhatsApp PULTRA CLUB Kapur* ini.

Untuk mengatasi masalah ini Kepala Desa sudah melakukan upaya atau mencari solusi sementara dalam mengatasi masalah ini. Proses yang diambil adalah mengundang masyarakat, BPD, LPM, Ninik Mamak karena pada dasarnya masyarakat pedesaan sangat menjunjung nilai-nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama (Setyoko et al., 2025), oleh sebab itu untuk para tokoh-tokoh tersebut menghadiri klarifikasi dan melakukan tranparasi dana yang dilakukan di aula Kantor Desa pada bulan Juli 2024. Klarifikasi ini dihadiri oleh lingkup masyarakat dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ninik mamak serta masyarakat. Sehingga hasil dari upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa ini yakni klarifikasi dan musyawarah yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat sudah dapat menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh Kepala Desa pada saat itu. Namun sampai saat ini intensitas konflik tersebut masih terasa bahkan sampai saat ini masyarakat yang kontra atau masyarakat yang belum menerima hasil dari klarifikasi tersebut masih menentang kebijakan-kebijakan yang ada, dan mereka memperlihatkan bahwa mereka tidak sependapat dan belum bisa menerima klarifikasi tersebut sehingga pertikaian antara masyarakat kontra dengan masyarakat pro ini masih ada sampai sekarang.

Dalam dinamika politik lokal beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dinamika politik ini kerap terjadi ditingkat masyarakat pedesaan dalam berbagai konteks, penelitian yang ditulis oleh (Fatmawati, 2022) menunjukkan bahwa dinamika politik lokal terjadi karena perbedaan kepentingan dan kekuasaan sering kali membuat pembentukan Perdes belum sepenuhnya berjalan partisipatif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sangadji et al (2021) menunjukkan bahwa konflik dinamika politik desa ini berkembang karena minimnya proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Penelitian lain yang mendukung yakni tulisan oleh (Muhamad, 2023) menyebutkan bahwa terjadinya dinamika konflik yang terjadi di desa Wadas yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar aparat, dan masyarakat desa, yang diperparah oleh minimnya partisipasi publik serta komunikasi yang tidak transparan dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya penelitian oleh Saudi & Perianto (2020) menyebutkan bahwa dinamika politik pada pilkada serentak menunjukkan bahwa proses yang dilakukan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan pemilu, sejalan dengan itu penelitian oleh Modena (2021) menunjukkan bahwa dinamika politik pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan status desa di Kota Sawahlunto terjadi seiring dengan

berbagai regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menghendaki perubahan dalam status desa ini, selanjutnya penelitian yang ditulis oleh [Raharjo \(2021\)](#) menjelaskan bahwa terjadinya permasalahan dinamika politik lokal kekuasaan dalam penetapan APBDes karena banyak kepentingan yang terjadi didalamnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kepala desa Air Ruai yang terlalu mementingkan diri sendiri tanpa melihat suara masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa dinamika politik di tingkat masyarakat pedesaan umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan dan relasi kekuasaan antaraktor, seperti pemerintah desa, lembaga formal, masyarakat adat, dan warga, yang muncul dalam proses pembentukan kebijakan desa yang berdampak pada pelanggaran HAM. Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat, minimnya musyawarah, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang memperbesar konflik dan ketegangan sosial. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang cenderung berfokus pada konflik sektoral atau kebijakan tertentu, penelitian yang dilakukan ini berfokus mengenai dinamika politik masyarakat pedesaan di Desa Sendayan mengkaji proses dinamika politik secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat desa, termasuk interaksi antar elite desa dan masyarakat serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pemerintahan desa dengan menggunakan teori Sirkulasi Elite oleh Pareto. Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya mengungkap pola dinamika politik lokal Desa Sendayan secara komprehensif dengan menekankan konteks sosial dan lokalitas desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami kehidupan sosial dengan melihatnya dari sudut pandang orang yang terlibat langsung (informan) dalam situasi yang alami ([Creswell, 2018](#)), pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk peneliti memahami secara mendalam dinamika politik dan konflik sosial yang terjadi di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau. Alasan pemilihan pendekatan ini karena metode studi kasus mampu mengkaji suatu kasus secara menyeluruh dan mendalam ([Assyakurrohim et al., 2022](#)). Penelitian dilaksanakan pada Juli hingga Oktober 2025. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan posisi dan keterlibatan langsung mereka dalam konflik politik desa ([Sugiyono, 2016](#)) informan berjumlah 15 orang yang terdiri dari kepala desa sebagai elite yang sedang berkuasa, perangkat desa, perwakilan elite lama (tim sukses atau pendukung calon sebelumnya), tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat atau terdampak langsung oleh polarisasi pasca Pilkades.

Data dikumpulkan melalui teknik observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam dinamika politik desa atau dapat dikatakan sebagai pengamat yang tidak ikut dalam kegiatan yang diamatinya, selanjutnya peneliti mendatangi lokasi atau kediaman informan untuk melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan, dan selanjutnya peneliti membutuhkan studi dokumen seperti arsip desa, berita acara, peta wilayah demografi desa, data penduduk, pendidikan, geografi desa dan dokumen yang diperlukan didapatkan di kantor desa Sendayan ([Nasution, 2023](#)). Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis ([Miles & Huberman, 1992](#)), yang terdiri atas empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, peneliti mengawali dengan menggali data dengan berbagai sumber yakni wawancara maupun pengamatan yang dilakukan di lapangan, selanjutnya reduksi data, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

Data yang telah terkumpul dan terseleksi kemudian dilakukan penyajian data, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang diperkuat oleh dokumen-dokumen terkait yang memperkuat hasil penelitian. Hasil temuan yang telah dianalisis kemudian dikaitkan dengan teori sirkulasi elite oleh Vilfredo Pareto untuk menginterpretasikan dinamika politik masyarakat pedesaan desa Sendayan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menafsirkan data untuk merumuskan hasil penelitian secara komprehensif. Guna memastikan keabsahan data, digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu ([Handayani, 2020](#)). Triangulasi ini diterapkan guna memastikan ketepatan informasi, didukung oleh pengumpulan data berulang sesuai jadwal penelitian yang telah disusun, triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Terpilihnya Kepala Desa Sendayan Pada Pilkades Serentak 2021

Proses terpilihnya Kepala Desa Sendayan dalam Pilkades Serentak Tahun 2021 berlangsung melalui tahapan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dimulai dari sosialisasi Peraturan Bupati oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada panitia kecamatan dan desa, proses Pilkades kemudian dilanjutkan dengan tahapan pencalonan yang terbuka bagi masyarakat desa yang memenuhi persyaratan administratif. Secara keseluruhan, proses Pilkades di Desa Sendayan mencerminkan mekanisme demokrasi desa yang berjalan relatif tertib, partisipatif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpinnya secara langsung (Dewi et al, 2025).

Hal ini dimulai dari tahap awal dari pendaftaran calon kepala desa yang terdapat 4 calon, selanjutnya para calon kepala desa tersebut melakukan kampanye secara tertib, selanjutnya tahap pencoblosan serta penghitungan surat suara sampai juga pada tahap pelantikan kepala desa terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa proses terpilihnya kepala desa ini mencerminkan bahwa terjadinya proses yang demokratis. Hal ini disampaikan oleh Bapak AND (40 Tahun), ia mengatakan bahwa:

“...Waktu Pilkades 2021 kemaren itu di desa kita ada 4 calon, dimana masing-masing calon itu memiliki program-program yang akan mereka jalani ketika besok terpilih. Program itu yang mereka suarakan di kampanye di masyarakat kita ini, ya pada umumnya semua pemilihan wajar melakukan aktivitas kampanye kan, termasuk juga lah para calon kades yang ada di desa kita kemaren seperti itu juga, sehingga pada saat pilkades serentak 2021 waktu itu di desa kita ini alhamdulillah berjalan lancar dan sukses...” (Wawancara tanggal 1 September 2025).

Penjelasan yang disampaikan oleh bapak AND (40 tahun) diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 di Desa Sendayan berlangsung dalam suasana yang kompetitif namun tetap kondusif, ditandai dengan adanya empat calon kepala desa yang masing-masing menawarkan program kerja sebagai bentuk visi dan komitmen kepada masyarakat melalui tahapan kampanye yang berjalan secara wajar dan demokratis, sehingga proses pemilihan dapat terlaksana dengan lancar dan dinilai sukses oleh masyarakat. Senada dengan itu juga disampaikan oleh ibu YD (50 tahun), ia menyebutkan:

“... Pada saat pilkades serentak tahun 2021 kemaren alhamdulillah berjalan lancar, ke-empat calon kepala desa waktu itu sudah menerima satu sama lain keputusan yang ada, yang no urut 4 yang terpilih menjadi kepala desa yakni Bapak Marlis, ia merupakan penduduk asli dusun Kapur ini, dan harapan masyarakat pada waktu itu mudah-mudahan dalam kepemimpinannya dapat amanah dalam menjalankan visi misi yang sudah dibentuk dan memajukan desa kita ini insyaallah yaa...” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2025).

Penjelasan yang sama oleh ibu YD (50 tahun) menyebutkan bahwa Pilkades Serentak 2021 di Desa Sendayan berlangsung secara damai dan demokratis, ditandai dengan penerimaan hasil pemilihan oleh seluruh calon serta terpilihnya calon nomor urut 4, Bapak Marlis, sebagai kepala desa yang berasal dari Dusun Kapur, sehingga memunculkan harapan masyarakat agar kepemimpinannya dapat dijalankan secara amanah sesuai visi-misi yang telah disampaikan serta mampu membawa kemajuan bagi desa. Senada dengan yang disampaikan ibu YD diatas, hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu PS (33 tahun), ia menyebutkan bahwa:

“...Kebetulan ibu dulu sewaktu pilkades 2021 ibu ikut sebagai anggota KPPS pada saat itu terjadi kesetaraan yang pastinya antara laki-laki dan perempuan, jumlahnya tentu mungkin nanti ada yang sama ada yang tidak tergantung kepada pemilih yang sudah mencapai usianya dan sudah ada hak memilih yang dilihat dari kepemilikan ktp dan berusia 17 tahun itu sudah diikuti sertakan, Setiap masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif untuk datang memilih sesuai dengan kepercayaannya, pada Pilkades tahun 2021 lalu itu terdapat 4 calon kepala desa, keempat nya pasti sudah punya rancangan program dan visi misi yang mereka buat, kita sebagai masyarakat tentu tinggal memilih sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing saja lagi ...” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2025).

Berdasarkan penuturan yang sebutkan oleh ibu PS (33 tahun) diatas dapat dipahami bahwa proses pilkades ini berjalan lancar sesuai dengan protokoler yang ada serta kesetaraan bagi masyarakat yang ikut dalam pemilihan ini serta partisipasi masyarakat untuk hadir di TPS dan memilih sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan keempat calon tersebut yang masing-masing memiliki visi-misi dan dari kutipan inilah yang menggambarkan bahwa adanya dinamika demokrasi lokal yang aktif, dimana warga masyarakat menentukan pilihannya secara mandiri berdasarkan pertimbangan dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan ketiga kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 di Desa Sendayan berlangsung secara demokratis, tertib, dan partisipatif, ditandai dengan adanya empat calon yang berkompetisi secara sehat melalui penyampaian visi dan misi, penerimaan hasil pemilihan oleh seluruh calon tanpa konflik terbuka, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya berdasarkan kepercayaan masing-masing; keseluruhan proses ini mencerminkan dinamika demokrasi lokal yang berjalan kondusif sekaligus menumbuhkan harapan kolektif masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa terpilih agar mampu menjalankan amanah dan membawa kemajuan bagi desa (Utami, 2021).

Munculnya Protes Terhadap Kinerja Kepala Desa Terpilih

Setelah dilantiknya kepala desa terpilih pada Rabu, 22 Desember 2021 oleh Bupati Kampar yakni bapak Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH di aula kantor Bupati Kabupaten Kampar, maka sejak saat itu bapak Marlis resmi menjadi pemimpin desa Sendayan periode 2021-2027. Yang mana artinya bahwa semua tanggung jawab dalam hal urusan desa Sendayan sudah dilimpahkan kepada bapak tersebut (Ciciria et al., 2021). Program kerja yang sudah dirancang sudah harus mulai dijalankan beberapa program kerja yang ada diantaranya perbaikan jalan desa dan pembuatan jalan setapak dan fasilitas umum, bantuan rumah layak huni, rehab rumah, pembangunan toilet, pengembangan UMKM masyarakat, ketahanan pangan, program penghijauan (bibit), dan layanan kesehatan, pembangunan, semenisasi, irigasi.

Protes terhadap kinerja kepala desa terpilih ini jelas dipicu oleh adanya program pembangunan desa yang terbengkalai dan tidak berjalan sesuai target. Masyarakat Sendayan memiliki harapan besar karena kepala desa telah menyampaikan sejumlah program pembangunan yang dianggap mampu memperbaiki kondisi desa. Namun, ketika program-program tersebut tidak kunjung direalisasikan atau berhenti di tengah jalan tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat mulai merasa kecewa dan mempertanyakan komitmen pemerintah desa. Keterlambatan atau terhentinya pembangunan ini kemudian memunculkan berbagai dugaan dan ketidakpuasan di tengah warga Sendayan. Sehingga kritik dan protes menjadi semakin sering muncul dalam percakapan sehari-hari maupun dalam forum-forum desa seperti yang sudah disebutkan diatas berita ini juga muncul dalam *WhatsApp Group* desa Sendayan.

Hal ini disampaikan oleh ibu YM (39 tahun) selaku masyarakat desa Sendayan, ia menyebutkan bahwa berita yang muncul ini awalnya dari grup WA atau berita yang menyebar di media sosial sehingga masyarakat mengetahui hal tersebut:

“... Sebelumnya memang banyak masyarakat yang tidak tau kalau ada masalah pembangunan ini, akan tetapi karena sekarang zaman sudah canggih semua berita itu bisa disebar dengan mudah dan cepat melalui sosial media, di desa kita kebetulan ada grup WA kan, dan dari situlah awal mulanya masyarakat dapat berita itu, ada salah-satu warga yang menyebarkan link berita itu di grup kita ini...” (Wawancara tanggal 06 Oktober 2025).

Dari yang dijelaskan informan diatas ibu YM (39 tahun) bahwa berita ini awalnya muncul karena sebaran berita salah satu masyarakat di *group WhatsApp* Faktor lain yang membuat adanya protes masyarakat Sendayan adalah dampak nyata dari pembangunan yang tidak selesai. Hal yang sama disebutkan oleh ibu AIM (25 tahun) bahwa:

“... Proses pembangunan yang terbengkalai itu awal mulanya diberitakan di grup dan itu beritanya memang panas pada saat itu, masyarakat pada protes dan bertanya kenapa itu tidak bisa selesai cepat dan sesuai target, itulah awalnya kemaren dan hal itu juga yang membuat keadaan desa makin mengeruh soalnya banyak masyarakat yang tidak terima akan hal tersebut...” (Wawancara tanggal 07 Agustus 2026).

Dari yang disampaikan informan ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan protes itu terjadi karena banyaknya pembangunan yang tidak selesai, dan membuat masyarakat tidak dapat menerimanya sehingga diperlukan transparansi, oleh karena itu masih banyak yang harus ditanyakan dan transparansi harus jelas oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Berdasarkan kedua kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa munculnya protes masyarakat Desa Sendayan berawal dari penyebaran informasi mengenai pembangunan yang terbengkalai melalui grup WhatsApp desa dan media sosial, yang kemudian memicu reaksi cepat dan meluas di kalangan warga karena banyak masyarakat sebelumnya tidak mengetahui permasalahan tersebut; kondisi ini diperparah oleh ketidakpuasan terhadap proyek pembangunan yang tidak selesai sesuai target, sehingga menimbulkan kekecewaan, pertanyaan publik, serta tuntutan akan transparansi dan kejelasan informasi dari pemerintah desa (Surya & Asda, 2023).

Penghasutan-Penghasutan Yang Terjadi Saat Protes

Protes yang muncul di Desa Sendayan tidak hanya dipicu oleh kekecewaan terhadap program pembangunan yang terbengkalai, tetapi juga diperkuat oleh adanya penghasutan-penghasutan dari sejumlah

pihak yang merasa tidak puas dengan kinerja kepala desa terpilih. Situasi ini muncul setelah masyarakat mulai mempertanyakan ketidaksesuaian antara janji kampanye dengan realisasi pembangunan. Ketegangan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah justru berkembang menjadi polemik yang semakin panas karena adanya pihak-pihak yang menyebarkan opini negatif dan memperkeruh keadaan. Penghasutan tersebut awalnya muncul dalam bentuk ajakan-ajakan sebagian masyarakat kontra yang disini yakni elite pemuda yang banyak mempengaruhi masyarakat untuk mendemo kepala desa karena tidak selesainya program pembangunan fisik desa (Sakti, 2021).

Bentuk dari gerak dari penghasutan yang ada yang terjadi di desa Sendayan yang dilakukan oleh elite pemuda adalah melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Bupati Kampar untuk mendesak agar segera memberhentikan Kepala Desa Sendayan sebagaimana yang diberitakan melalui lampiran url berita yang beredar ini “ <https://www.potretperistiwa.com/2024/06/minta-kades-diberhentikan-warga.html>” dalam blog ini yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh media *PotretPeristiwa* yang berisikan bahwa masyarakat akan melakukan aksi demo atau unjuk rasa kepada bupati Kampar atas penggunaan dana desa yang tidak jelas oleh kepala desa dan juga menuntut kepala desa karena tidak menyelesaikan pembangunan fisik yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2023 lalu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu MSDW (43 tahun), bahwa:

“... Aksi protes itu memang benar adanya terjadi, mulai dari yang awalnya protes di kantor desa, dan pada saat itu dilakukan mediasi namun para masyarakat tersebut mengambil bentuk protes seperti itu dengan menemui bupati kampar untuk melakukan unjuk rasa atas keterlambatan penyelesaian program desa, masyarakat tersebut betul melakukan itu pada tanggal 07 Juni 2024 ya kalau tidak salah..” (Wawancara tanggal 1 Agustus 2025).

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu MSDW (43 tahun) iya menyebutkan bahwa aksi protes masyarakat Desa Sendayan benar-benar terjadi dan berkembang secara bertahap, dimulai dari penyampaian keberatan di kantor desa hingga upaya mediasi, namun karena ketidakpuasan terhadap penyelesaian masalah, sebagian masyarakat kemudian meningkatkan bentuk protes dengan melakukan unjuk rasa dan menemui Bupati Kampar pada 7 Juni 2024 sebagai bentuk tekanan politik atas keterlambatan realisasi program desa, yang mencerminkan eskalasi dinamika politik lokal akibat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah desa. Hal senada juga disampaikan oleh bapak MDHL (39 tahun), yakni:

“... Desa kita ini kan panas ya kalau bahas masalah politik, jadi kalau ada masalah yang terjadi pasti heboh masyarakat kita se-desa ini, apalagi tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh pemuda desa yang menyebarkan berita serta juga sudah keluar juga di blog beritanya bahwasanya sebagian masyarakat melakukan aksi protes ke Bupati Kampar pada waktu itu....” (Wawancara tanggal 30 Agustus 2025).

Penjelasan dari bapak MDHL (39 tahun) ini menjelaskan dinamika politik di Desa Sendayan tergolong sensitif dan mudah memanas, sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan cepat menyebar dan menjadi perhatian luas masyarakat, terlebih ketika tokoh masyarakat dan pemuda turut berperan dalam menyebarkan informasi melalui media sosial dan blog; kondisi ini memperlihatkan bagaimana peran aktor-aktor lokal dan media digital mempercepat eskalasi isu hingga memunculkan aksi protes masyarakat kepada Bupati Kampar sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan politik.

Berdasarkan kedua interpretasi wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksi protes masyarakat Desa Sendayan merupakan bentuk eskalasi ketidakpuasan yang berkembang secara bertahap, dimulai dari penyampaian aspirasi di tingkat desa hingga berujung pada unjuk rasa ke Bupati Kampar pada 7 Juni 2024, yang dipicu oleh keterlambatan penyelesaian program desa; dinamika ini semakin memanas karena karakter politik desa yang sensitif serta peran tokoh masyarakat dan pemuda dalam menyebarkan informasi melalui media sosial dan blog, sehingga mempercepat mobilisasi opini publik dan memperkuat tekanan politik terhadap pemerintah desa.

Data gerakan aksi masyarakat elite pemuda sebagaimana dalam blog berita ini yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh media *PotretPeristiwa* yang berisikan bahwa masyarakat akan melakukan aksi demo atau unjuk rasa kepada bupati kampar, atas penggunaan dana desa yang tidak jelas oleh kepala desa dan juga menuntut kepala desa karena tidak menyelesaikan pembangunan fisik yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2023 lalu, hal ini menunjukkan bahwa adanya gerakan dari aksi protes dan penghasutan yang terjadi di desa Sendayan sehingga elite pemuda membuat gerakan ini sebagai aksi dari protes tersebut (Peristiwa, 2024).

Munculnya Konflik di Permukaan

Munculnya konflik di permukaan di Desa Sendayan berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang tidak berjalan sesuai harapan. Kekecewaan ini pada awalnya hanya

berupa keluhan kecil di tengah masyarakat, tetapi lama-kelamaan semakin membesar karena tidak ada penjelasan yang jelas dari pihak pemerintah desa. Situasi yang awalnya tenang mulai berubah ketika warga mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan pembangunan yang dijanjikan pada masa kampanye.

Terjadinya konflik ini dapat ditelusuri sejak mulai terlihatnya ketidakrealisasian program pembangunan pada tahun 2023, dan semakin memuncak sepanjang tahun 2024. Ketika kekecewaan masyarakat tidak direspon dengan transparansi yang memadai, perbedaan pandangan pun semakin mengeras dan membentuk tiga kubu tersebut. Inilah yang membuat konflik menjadi semakin nyata dan muncul ke permukaan sebagai bagian dari dinamika politik dan sosial di Desa Sendayan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan beberapa informan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu SS (29 tahun), yakni:

“... Yang sekarang ini dampak yang terlihat dari munculnya konflik yang dimauli dari tahun 2023 yang lalu sampai sekarang yang terlihat ada tiga kelompok sekarang ini seperti masyarakat pro, ada juga yang memberontak dan ada juga yang acuh tak acuh, jadi disitu kelihatan 3 kelompok dan dari situ terlihat adanya berkurangnya sapa menyapa antara orang-orang itu makanya itu tanda dampak dari masalah politik ini, padahal masalah politik ini udah dari lama kan tetapi masih juga sampai sekarang...” (Wawancara tanggal 11 Agustus 2025).

Hal ini diungkapkan oleh Ibu SS (29 tahun) iya menjelaskan bahwa dari konflik yang tampak di permukaan desa Sendayan sekarang memunculnya beberapa kelompok didalam desa Sendayan ini, sehingga membuat interaksi yang biasanya berlangsung secara alami dalam kegiatan sehari-hari kini mulai menunjukkan batas-batas sosial antar sesama masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak HB (67 tahun), yakni :

“...Dari aksi protes yang terjadi waktu itu di kantor bupati Kampar, sangat disayangkan ya dampaknya akan seperti ini, masyarakat kita menjadi terpecah belah yang dulu masyarakat desa kita ini sangat kompak, namun setelah kejadian itu banyak masyarakat yang membatasi kegiatan karna tidak lagi sama cara pandangnya terhadap politik desa atau lebih jelasnya tentang pemerintahan desa kita ini, jadi dari situlah awal mulanya konflik ini terangterangan kelihatan di permukaan, oleh sebab itu kepala desa pun melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut...” (Wawancara tanggal 29 Juli 2025).

Dari yang disampaikan oleh HB (67 tahun) diatas menyebutkan bahwa setelah peristiwa unjuk rasa tersebut, hubungan sosial yang sebelumnya kompak dan harmonis mulai goyah, perbedaan pandangan politik, terutama terkait pemerintahan desa, membuat sebagian warga memilih membatasi interaksi dan kegiatan bersama. Situasi ini menandai munculnya konflik yang tidak lagi tersembunyi, tetapi sudah terlihat jelas di permukaan karena masyarakat mulai menunjukkan jarak dan perbedaan sikap secara terbuka. Disimpulkan bahwa munculnya konflik di Desa Sendayan berawal dari perbedaan pandangan politik yang semakin tajam pasca aksi protes dan persoalan pemerintahan desa, sehingga memunculkan polarisasi masyarakat ke dalam kelompok pro, kontra, dan apatis kondisi ini menyebabkan hubungan sosial yang sebelumnya harmonis menjadi renggang, interaksi antarwarga berkurang, serta konflik yang awalnya bersifat laten berubah menjadi terbuka dan terlihat jelas dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari (Muhammad, 2025).

Di tengah situasi yang semakin panas ini muncul pula pengaruh dari beberapa elite desa yang memiliki pandangan berbeda terhadap kepemimpinan kepala desa yakni elite pemuda. Elite ini merasa kepentingannya terganggu ikut mendorong masyarakat untuk lebih vokal menyampaikan ketidakpuasan mereka. Sementara itu elite pemerintahan desa mencoba menenangkan warga, tetapi upaya tersebut tidak selalu berhasil. Persaingan pendapat di antara elite semakin membuat konflik mudah terlihat dan semakin sulit dikendalikan (Taqwa & Usman, 2023).

Solusi Pasca Konflik Terjadi di Masyarakat Sendayan

Pasca terjadinya konflik di Desa Sendayan, salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Konflik yang muncul sebelumnya terutama disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian elite pemuda terhadap kinerja kepala desa Sendayan, terutama terkait pembangunan yang dianggap tidak berjalan dengan baik. Elite pemuda ini merasa bahwa pemimpin desa belum menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal, sehingga program pembangunan yang dijanjikan tidak terlihat hasilnya. Kondisi inilah yang akhirnya memicu aksi protes dan memperbesar ketegangan di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh ibu HR (42 tahun) yang menjelaskan bahwa protes ini ditelusuri sehingga nantinya akan didapatkan solusi yang akan disepakati bersama.

“...Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata benar pemimpin desa tidak menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab nya, sehingga banyak bukti yang beredar bahwa dana pembangunan desa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga protes ini menjadi hal yang wajar oleh masyarakat, sehingga masih berlanjutnya proses pengecekan untuk pemimpin desa oleh Bupati Kampar pada waktu itu...” (Wawancara tanggal 05 Agustus 2025)

Berdasarkan yang disebutkan oleh ibu HR (42 tahun) menjelaskan bahwa protes masyarakat Desa Sendayan didasarkan pada dugaan kuat adanya kelalaian atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana pembangunan desa oleh pemimpin desa, yang diperkuat oleh beredarnya berbagai bukti di tengah masyarakat, sehingga aksi protes dipandang sebagai respons yang wajar dan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah desa; situasi ini juga mendorong adanya proses penelusuran dan pengecekan lebih lanjut oleh Bupati Kampar sebagai bentuk tindak lanjut atas tekanan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan hal ini juga disampaikan oleh ibu TN (23 tahun), menyebutkan bahwa:

“...Untuk pembangunan desa sesuai dengan berita yang dikeluarkan ya memang benar bahwasanya terjadi ketidaktransparan dari pemimpin desa dengan yang sudah di sepakati, sehingga hal ini jadi bahan untuk di perbincangkan agar tidak ada disalah gunakan demi kemajuan desa kita ini dan hasilnya menunjukkan bahwa kades harus menyelesaikan perihal tersebut dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan...” (Wawancara tanggal 09 Agustus 2025).

Berdasarkan yang dijelaskan oleh ibu TN (23 tahun) menjelaskan bahwa persoalan utama yang memicu protes masyarakat adalah masalah ketidaktransparanan dalam pengelolaan pembangunan desa Sendayan. Informan menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara apa yang telah disepakati sebelumnya dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin desa. Ketidakjelasan penggunaan anggaran ini kemudian menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat karena dikhawatirkan ada penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan bukti-bukti bahwa pemimpin desa memang tidak menuntaskan tanggung jawabnya dalam menjalankan program pembangunan.

Setelah konflik di desa Sendayan ini mulai sedikit mereda, elite pemuda tersebut justru memainkan peran penting dalam menawarkan solusi. Mereka mendorong adanya evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga masyarakat bisa melihat secara jelas apa saja yang sudah dan belum dikerjakan. Bagi masyarakat desa Sendayan ini transparansi adalah langkah awal yang harus dilakukan agar tidak muncul lagi kecurigaan atau prasangka buruk terhadap kepala desa. Upaya lain yang juga dianggap penting adalah penyusunan kembali rencana pembangunan desa secara lebih terarah dan terukur ([Adnyani, 2021](#)). Elite pemuda menilai bahwa selama ini perencanaan pembangunan kurang jelas, sehingga hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan membuat rencana pembangunan secara detail dan mengumumkannya kepada warga, pemerintah desa dapat menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki situasi dan menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini juga bisa menjadi bukti konkret bahwa kepala desa berusaha memperbaiki kekurangan yang menjadi sumber konflik ([Farizan et al., 2022](#)).

Pergantian Elite Yang Berkuasa Pasca Konflik Terjadi

Setelah konflik di Desa Sendayan mencapai puncaknya, tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan dalam kepemimpinan semakin kuat. Banyak warga merasa bahwa kepala desa yang menjabat saat itu tidak mampu memenuhi janji-janji pembangunan yang pernah disampaikan pada masa kampanye. Program-program penting tidak kunjung terlaksana, sementara komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terus memburuk ([Maulana & Warganegara, 2025](#)). Kondisi ini membuat tekanan publik semakin besar, hingga akhirnya pemerintah kecamatan mengambil langkah untuk menonaktifkan kepala desa untuk sementara waktu demi meredakan situasi desa. Hal ini disampaikan oleh ibu MSDW (43 tahun) bahwa:

“...Penonaktifan kepala desa menjadi titik awal munculnya pergantian elite yang berkuasa. Dalam masa transisi tersebut, posisi kepala desa digantikan oleh pejabat sementara (Pjs) yang ditunjuk untuk menjaga stabilitas dan mengelola pemerintahan desa dan yang menjadi Pjs kepala desa Sendayan sementara yakni ibu camat Kampar Utara yakni ibu Riska Jonita Eka Putri, S.STP, M.Si...” (Wawancara tanggal 1 Agustus 2025).

Berdasarkan yang disampaikan ibu MSDW (43 tahun) menjelaskan bahwa pergantian ini disambut baik oleh sebagian masyarakat desa Sendayan, terutama mereka yang merasa bahwa pemerintah desa sebelumnya kurang transparan. Dengan hadirnya pemimpin sementara, warga berharap ada perubahan cara kerja yang lebih terbuka serta pengelolaan pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak AND (40 tahun), yakni:

“...Adanya pergantian kepemimpinan desa yang terjadi dari kepala desa sebelumnya ke pjs sekarang yaitu ibu camat Kampar Utara, pergantian ini terjadi setelah proses yang panjang, yang akhirnya membuat surat keputusan bahwasanya kepala desa Sendayan di non aktifkan dulu sampai dapat menyelesaikan semua administrasi desa kita...” (Wawancara tanggal 1 September 2025).

Dari yang disampaikan oleh bapak AND (40 tahun) diatas menjelaskan bahwa selama masa transisi kepemimpinan, beberapa perubahan dilakukan untuk memperbaiki situasi desa. Pemerintah sementara atau penjabat sementara yakni ibu camat Kampar Utara mulai menyusun laporan pembangunan secara terbuka, membahas prioritas desa melalui musyawarah, dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dalam pengawasan anggaran. Kehadiran pemimpin baru dengan pendekatan yang lebih transparan ini perlahan memulihkan kepercayaan warga (Kasmawanto, 2025). Masyarakat yang sebelumnya terbelah oleh konflik mulai kembali bersatu karena adanya harapan bahwa desa sedang berada menuju arah yang lebih baik. Pergantian elite yang berkuasa pasca konflik di Desa Sendayan ini memperlihatkan bahwa dinamika politik desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin untuk memenuhi kebutuhan publik. Jika pemimpin gagal menjaga kepercayaan, maka pergantian adalah sesuatu yang tak terelakkan.

Pembahasan

Teori Sirkulasi Elite oleh Vilfredo Pareto dalam menganalisis dinamika politik desa Sendayan

Dalam dinamika politik pasca pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2021, dianalisis dengan teori Vilfredo Pareto, dalam teori Sirkulasi Elite ini terdapat 2 elite yakni *Governing Elite* (elit yang berkuasa) dan *NonGoverning elite* (elite yang tidak berkuasa). Dalam konteks Desa Sendayan ini elite yang bersaing ini yaitu elite yang berkuasa pada saat itu adalah Kepala Desa sedangkan elite yang tidak berkuasa ialah elite pemuda desa. Peran elite yang berkuasa atau *Governing Elite* pada saat terjadinya dinamika politik di Desa Sendayan Elite berkuasa yaitu kepala desa, memiliki peran sebagai pemegang otoritas formal yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, serta pengelolaan sumber daya desa guna mempertahankan stabilitas dan legitimasi pemerintahannya (Pangestika et al., 2024).

Governing Elite Dalam Dinamika Politik Lokal Desa Sendayan

Dalam teori Pareto governing elite, kelompok kecil yang sedang memegang kekuasaan dan memiliki kewenangan resmi dalam suatu sistem pemerintahan. Di Desa Sendayan, governing elite merujuk pada kepala desa terpilih beserta perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan setelah Pilkades 2021. Mereka memperoleh legitimasi melalui proses demokratis yakni pemilihan kepala desa serentak, sehingga pada awal masa kepemimpinan mendapatkan dukungan dan harapan besar dari masyarakat. Realita dalam perkembangannya, muncul persoalan terkait keterlambatan pembangunan desa yang memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Ketika program yang dijanjikan tidak terealisasi sesuai harapan, maka posisi governing elite mulai dipertanyakan, kondisi ini disebut sebagai melemahnya legitimasi, yaitu ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mulai berkurang. Kritik, protes, dan tuntutan transparansi yang muncul merupakan bentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap elite yang berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak bersifat mutlak, melainkan selalu berada dalam pengawasan publik. Dalam teori sirkulasi elite Pareto, elite yang berkuasa harus mampu beradaptasi dengan tekanan sosial agar tetap mempertahankan posisinya (Amin, 2017).

Governing elite mampu melakukan klarifikasi, membuka ruang dialog, dan memperbaiki kinerja, maka stabilitas kekuasaan dapat dipulihkan. Akan tetapi jika ketidakpuasan terus berlanjut tanpa solusi yang jelas, maka akan muncul peluang bagi elite lain untuk mengambil alih pengaruh politik. Inilah yang disebut sebagai proses sirkulasi elite berkuasa. Dinamika yang terjadi di Desa Sendayan memperlihatkan bahwa governing elite tidak hanya diuji dari aspek legalitas kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan sosial. Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kinerja dan transparansi berpotensi memicu konflik serta membuka ruang bagi perubahan struktur elite (Haboddin, 2020).

Non-Governing Elite Dalam Dinamika Politik Lokal Desa Sendayan

Non-governing elite dalam teori Pareto adalah kelompok elite yang tidak sedang memegang kekuasaan formal, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. dalam dinamika politik desa Sendayan kelompok non governing elite yakni berasal dari pemuda, atau individu yang memiliki jaringan sosial luas. Meskipun tidak berada dalam struktur pemerintahan, mereka tetap memiliki kemampuan memengaruhi opini publik. Di Desa Sendayan, non-governing elite terlihat aktif ketika isu pembangunan yang terbengkalai mulai menyebar. Mereka berperan dalam menyampaikan kritik, menyebarkan informasi melalui media sosial dan *Group WhatsApp*, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah desa. Peran ini menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak hanya berada di kantor desa, tetapi juga dalam ruang sosial masyarakat.

Kelompok non-governing ini disebut sebagai elite oposisi atau elite alternatif. Mereka menjadi penyeimbang bagi elite yang berkuasa. Ketika governing elite dianggap tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka non-governing elite akan tampil sebagai suara koreksi atau bahkan sebagai penggerak perubahan. Peran non-governing elite semakin kuat ketika didukung oleh media sosial. Penyebaran informasi yang cepat membuat isu politik lebih mudah berkembang dan membentuk opini publik.

Menurut teori sirkulasi elite Pareto, dalam situasi krisis legitimasi, non-governing elite memiliki peluang untuk menggantikan governing elite. Proses ini bukan selalu melalui jalur formal, tetapi melalui pembentukan opini dan pengaruh sosial yang perlahan menggeser dominasi elite yang sedang berkuasa. dinamika di Desa Sendayan menunjukkan adanya interaksi dan persaingan antara elite yang berkuasa dan elite di luar kekuasaan. Persaingan ini merupakan bagian alami dari kehidupan politik dan menjadi ciri dari proses sirkulasi elite dalam masyarakat (Malang, 2019).

Residu Dalam Dinamika Politik Lokal Desa Sendayan

Residu adalah kecenderungan dasar atau dorongan psikologis yang memengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan politik. Desa Sendayan, residu dapat dilihat dari dorongan untuk mempertahankan kekuasaan dan dorongan untuk melakukan perubahan. Pada governing elite, residu yakni terlihat upaya mempertahankan posisi dan legitimasi. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki keinginan untuk menjaga stabilitas kekuasaan serta mempertahankan citra positif di mata masyarakat. Dorongan ini membuat elite berusaha memberikan klarifikasi atau pembenaran atas kebijakan yang dipersoalkan. Kelompok masyarakat dan non-governing elite, residu terlihat dalam bentuk dorongan untuk menuntut keadilan dan perubahan. Ketika muncul ketidakpuasan terhadap pembangunan desa, muncul keinginan kolektif untuk meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Dorongan ini menjadi dasar munculnya protes dan kritik (Haboddin, 2020).

Pareto membedakan beberapa jenis residu, seperti residu kombinasi (kecenderungan untuk melakukan inovasi atau perubahan) dan residu persistensi agregat (kecenderungan mempertahankan struktur yang ada). Dalam dinamika politik Desa Sendayan, kedua jenis residu ini saling berhadapan satu pihak ingin mempertahankan stabilitas, sementara pihak lain ingin mendorong perubahan (Kades dan Pemuda). Interaksi antara kades dan pemuda ini menciptakan ketegangan sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka. Konflik ini sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba, melainkan hasil dari dorongan-dorongan yang telah lama ada dalam struktur sosial desa. Residu membantu menjelaskan bahwa dinamika politik tidak hanya dipengaruhi faktor administratif atau ekonomi, tetapi juga oleh kecenderungan psikologis dan kepentingan dasar manusia dalam mempertahankan atau merebut kekuasaan.

Derivasi Dalam Dinamika Politik Lokal Desa Sendayan

Derivasi dalam teori Pareto merupakan alasan atau pembenaran rasional yang digunakan untuk menjelaskan tindakan yang sebenarnya didorong oleh residu. Dengan kata lain, derivasi adalah bentuk argumentasi yang disampaikan ke publik agar tindakan elite terlihat masuk akal dan dapat diterima. Desa Sendayan governing elite (Kepala Desa) menggunakan derivasi berupa penjelasan administratif, prosedural, dan teknis untuk menjawab kritik terkait pembangunan desa. Mereka mungkin menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena faktor regulasi, proses anggaran, atau kendala teknis lainnya. Argumentasi ini bertujuan untuk menjaga legitimasi dan meredakan ketidakpuasan masyarakat desa Sendayan.

Perbedaan derivasi ini menciptakan pertarungan wacana di ruang publik. Masing-masing pihak berusaha membangun argumen yang paling meyakinkan agar mendapatkan dukungan sosial (Amin, 2017). Derivasi berfungsi untuk membungkus kepentingan politik dalam bahasa yang dapat diterima masyarakat. Oleh sebab itu setiap elite berusaha membangun legitimasi melalui penjelasan yang rasional dan normatif. dalam dinamika politik Desa Sendayan, derivasi menjadi alat penting dalam mempertahankan maupun menantang kekuasaan. Pertarungan argumen ini merupakan bagian dari proses sirkulasi elite yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dipertahankan, digugat, dan berpotensi berganti dalam kehidupan politik lokal (Haboddin, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa proses Pilkades 2021 di Desa Sendayan pada awalnya berlangsung demokratis dan kondusif, namun dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap realisasi program pembangunan yang memicu protes dan aksi unjuk rasa. Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial dan peran tokoh lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat penyebaran isu serta membentuk opini publik yang kemudian memperkuat polarisasi di tengah masyarakat. Dinamika politik lokal tersebut menunjukkan terjadinya sirkulasi elite yang tidak berjalan secara stabil, sehingga memunculkan konflik terbuka antara governing elite dan non-governing elite yang berdampak pada

terbelahnya masyarakat ke dalam beberapa kelompok sosial. Konflik tersebut tidak hanya dipicu oleh persoalan administratif dan keterlambatan program pembangunan, tetapi juga diperkuat oleh perbedaan kepentingan, residu, dan derivasi dalam memaknai kekuasaan desa. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa teori sirkulasi elite Vilfredo Pareto relevan digunakan untuk membaca dinamika politik di tingkat desa, khususnya dalam melihat bagaimana pergantian dan pertarungan elite dapat memengaruhi kohesi sosial masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu desa dengan pendekatan kualitatif, sehingga belum dapat digeneralisasi ke konteks desa lain yang memiliki karakter sosial dan politik berbeda. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas lokasi studi, menggunakan pendekatan komparatif antar desa, serta menggali lebih dalam aspek kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan desa guna memperkaya analisis tentang stabilitas politik lokal dan pencegahan konflik sosial.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2021). Pembangunan Kawasan Sempadan Pantai Amed dengan Pelibatan Elite Desa Adat Kajian Penguatan Identitas Kelembagaan Lokal. *Jurnal Ika Undiksha*, 19(1), 58–69. <https://doi.org/10.23887/ika.v>
- Amin, K. (2017). Elit Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK*, 11(2), 167–187.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Bapa, F., & Ola, U. (2020). Dinamika Politik Desa Studi Tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades Di Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–14.
- Ciciria, D., Ferliana, L., & Hamer, W. (2021). Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Desa Di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. *Social Pedagogy : Journal Of Social Science Education*, 2(1).
- Dewi, Tiara, Gun Gun Gumilar, R. R. (2025). Residu Demokrasi, Menggali Makna Konflik Sosial Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa: Analisis Fenomenologi Empirik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 12127–12138.
- Farizan, M. L., Budhi, S., & Hamid, I. (2022). Spiral Of Silence ; Gerakan Elite Lokal dalam Pemekaran Wilayah Gambut Raya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 4(2), 63–83.
- Fatmawati, R. (2022). Dinamika Politik Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasa Syar' Iyyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar' Iyyah*, 3(2), 272–283.
- Haboddin, M. (2020). Sirkulasi Elite Lokal Di Bantaeng. *Jurnal Transformative*, 6(1), 72–90. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.01.4>
- Handayani, R. (2020). *Metode Penelitian Sosial*. Alfabeta
- Hendrajad, G. C. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Puri Tahun 2021 di Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 1–11.
- Kasmawanto, Z. (2025). Dinamika Konflik Politik di Desa : Proses dan Dampaknya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(3).
- Kolang, L., & Mesra, R. (2025). Bentuk Sistem Politik di Desa Beringin. *Etic (Education And Social Science Journal)*, 2(5), 509–519.
- Malang, D. I. K. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 13(1), 181–206.
- Maulana, R. & Warganegara, T. M. (2025). Dinamika Hubungan Politik Antar Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa : Studi Perbandingan Kinerja Keuangan Desa. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3644–3658
- Modena, B. J. (2021). Dinamika Politik Pemerintah dan Masyarakat dalam Mempertahankan Status Desa d Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 12(2).
- Muhamad, R. M. (2023). Dinamika Konflik Pertambangan dan Pelanggaran Ham : Studi Kasus Konflik Tambang Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 7, 809-20.
- Muhammad, Y. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat di Desa Moga. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3).
- Nasution, A. Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Dr. Hj. Meyniar Albina (Ed.). CV.Harfa Creative.
- Pangestika, R. M., Maksu, A., & Haboddin, M. (2024). Sirkulasi Elite Lokal di Kabupaten Ponorogo. *Journal of Multidisciplinary Research And Development*, 6(6), 2885–2896.

-
- Prastiwi, J. H., & Ulfah, I. F. (2022). Dinamika Politik dalam Pendirian dan Pengelolaan Bumdes : Studi Pada Tiga Bumdes Terbaik Jawa Timur. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 78–95. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.20412>
- Raharjo, P. (2021). Dinamika Politik Lokal Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2021 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 1–7.
- Rakan, S., & Suhartono, S. (2025). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3).
- Rohmawati, T. (2013). Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 1.
- Sakti, L. P. (2021). Logika Elite Desa Dalam Praktik Pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul. *Jurnal Pariwisata*, 8(1), 32–42.
- Sangadji, I. M., Lubis, D. P., & Sjaf, S. (2021). Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah). *(JrpK) Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 3(2), 332–346.
- Saudi, A., & Perianto, R. (2020). Dalam Suksesi Kemenangan Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman Tahun 2013. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 3(2), 100–114.
- Setyoko, J., Dison, R., & Nasmarita, W. (2025). Keterlibatan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pada Masyarakat Di Dusun Tanah Tumbuh. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 7(1), 116–134.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Surya, M. B. A., & Asda. (2023). Resolusi Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak 2023 (Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur). *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1).
- Taqwa, R., & Usman, S. (2023). Peran Elit Lokal Dalam Sosialisasi dan Mobilisasi Politik Pada Masa Transisi Demokrasi. *Konferensi Nasional Sosiologi*, 1(2), 7–9.
- Utami, G. N. (2021). Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Gunung Raya Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1).
- Wahyudi, V. (2023). Dinamika Politik Lokal Perspektif Kewilayahan Dalam Menciptakan Pembangunan Masyarakat Desa “ Rural Politics .” *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 25–35.